



**BUPATI GRESIK**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 45 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 156 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan, : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik .

#### Pasal 3

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja,
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010.

#### Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja .

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada Bupati.

Pasal 6

untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan ini, Inspektorat Kabupaten Gresik diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan Review atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah guna meningkatkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati Gresik.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 9 September 2009      No: 545**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 9 September 2009

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM**

Lampiran : Keputusan Bupati Gresik  
 Nomor : 45 Tahun 2009  
 Tanggal : 9 September 2009

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN
A	PENDIDIKAN	1 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Dinas Pendidikan	Semakin tinggi angka partisipasi menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan kinerja pelayanan pendidikan
			Jumlah anak usia 4 – 6 tahun		
		2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket	Dinas Pendidikan	Idealnya 100%
			Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn		
		3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B	Dinas Pendidikan	Idealnya 100%
			Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn		
		4 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C	Dinas Pendidikan	Idealnya 100%
			Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn		
		5 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI	Dinas Pendidikan	Semakin rendah angka putus sekolah menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan kinerja pelayanan pendidikan
			Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya		
6 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs	Dinas Pendidikan	Semakin rendah angka putus sekolah menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan kinerja pelayanan pendidikan		
	Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pd tahun ajaran sebelumnya				
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan	Semakin rendah angka putus sekolah menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan kinerja pelayanan pendidikan		
	Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya				
8 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Dinas Pendidikan	Idealnya 100%		
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya				
9 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Dinas Pendidikan	Idealnya 100%		
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya				
10 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan	Idealnya 100%		
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya				
		11 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Dinas Pendidikan	Idealnya 100%

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN	
			Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya			
		12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	Dinas Pendidikan	Idealnya 100%
		13	Rasio jumlah guru yang berpendidikan S1/D-IV terhadap	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan	Idealnya 100%
		14	Rasio jumlah murid terhadap guru	Jumlah Murid SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan	Berdasarkan PP No.19 Tahun 2005 bahwa minimal rasio murid terhadap guru adalah 1:40
		15	Rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas	Jumlah Murid SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Jumlah Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan	Berdasarkan PP No.19 Tahun 2005 bahwa jumlah murid tiap kelas adalah 40
		16	Angka rata-rata lama sekolah	Lama sekolah penduduk yang bersekolah Jumlah penduduk yang bersekolah	Dinas Pendidikan	UNDP menetapkan angka ideal rata-rata lama sekolah adalah 15 Tahun
		17	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis Jumlah penduduk usia 15th ke atas	Dinas Pendidikan	Idealnya 100%
		18	Rasio anggaran pendidikan terhadap total APBD	Jumlah anggaran belanja pendidikan Jumlah APBD	Dinas Pendidikan	Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 bahwa minimal anggaran pendidikan adalah 20%
B	Kesehatan	1	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Jumlah ibu hamil yang melaksanakan kunjungan K4 Jumlah Ibu hamil	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 95% tahun 2015
		2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 80% tahun 2015
		3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 90% tahun 2015
		4	Cakupan pelayanan nifas	Jumlah ibu melahirkan yang melaksanakan pemeriksaan nifas	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 90%

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Jumlah ibu melahirkan		tahun 2015
		5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah ibu melahirkan yang mengalami komplikasi yang ditangani Jumlah ibu melahirkan yang mengalami komplikasi	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 80% tahun 2010
		6 Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes.sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 100% tahun 2010
		7 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 90% tahun 2010
		8 Cakupan pelayanan anak balita	Jumlah anak balita yang melaksanakan pemeriksaan secara rutin Jumlah anak balita	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 90% tahun 2010
		9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin	Jumlah anak usia 6-12 bulan pada keluarga miskin yang mendapatkan asupan makanan pendamping ASI Jumlah anak usia 6-12 bulan pada keluarga miskin	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 100% tahun 2010
		10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 100% tahun 2010
		11 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/setingkat	Jumlah siswa SD/setingkat yang mengikuti penjangkaran kesehatan Jumlah siswa SD/setingkat	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 100% tahun 2010
		12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	Jumlah penemuan penderita penyakit yang ditangani Jumlah penemuan penderita penyakit	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 100% tahun 2010
		13 Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Jumlah keluarga miskin	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 100% tahun 2015
		14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin	Jumlah penduduk miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan rujukan Jumlah keluarga miskin	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 100% tahun 2015

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN	
		15	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Jumlah pasien gawat darurat yang diberikan pelayanan gawat darurat level 1	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 100% tahun 2015
			Jumlah pasien gawat darurat			
		16	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam	Jumlah desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 100% tahun 2015
				Jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB		
		17	Cakupan desa siaga aktif	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Permenkes No.741/MENKES/PER/VII/2008 bahwa Cakupannya adalah 80% tahun 2015
				Jumlah desa/kelurahan		
		18	Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	Jumlah Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Belum ada batasan minimal/ maksimal, makin besar rasionya menunjukkan makin baik kinerja pelayanan kesehatan
Jumlah Penduduk						
19	Rasio sarana prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk	Jumlah sarana prasarana kesehatan	Dinas Kesehatan	Belum ada batasan minimal/ maksimal, makin besar rasionya menunjukkan makin baik kinerja pelayanan kesehatan		
		Jumlah Penduduk				
20	Angka Harapan Hidup	Jumlah Usia Meninggal	Dinas Kesehatan	Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan yang semakin baik		
		Jumlah Penduduk yang Meninggal				
21	Rasio anggaran kesehatan terhadap total APBD	Jumlah anggaran belanja kesehatan	Dinas Kesehatan	Belum ada batasan minimal/ maksimal, namun besar kecilnya menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap kesehatan		
		Jumlah APBD				
C	Lingkungan Hidup	1	Persentase cakupan penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani (m3)	Badan Lingkungan Hidup	Idealnya 100%
			Volume produksi sampah (m3)			
		2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/ UPL	Jumlah perusahaan yang memiliki AMDAL dan UKL/UPL	Badan Lingkungan Hidup	Idealnya 100%
				Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL DAN UKL/UPL		
		3	Persentase cakupan penanganan kebersihan fasilitas umum	Luas penanganan kebersihan fasilitas umum	Badan Lingkungan Hidup	Idealnya 100%
				Luas fasilitas umum		
4	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	Badan Lingkungan Hidup	Idealnya 100%		
		Jumlah kasus lingkungan yang ada				
5	Rasio ruang terbuka hijau	Luas Ruang Terbuka Hijau	Badan Lingkungan Hidup	Di wilayah perkotaan minimal 20%		
		Luas Wilayah				
6	Persentase lahan kritis yang	Luas lahan kritis yang dipulihkan	Badan Lingkungan	Idealnya 100%		

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN	
		berhasil dipulihkan	Luas lahan kritis	Hidup		
D	Pekerjaan Umum	1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Panjang seluruh jalan kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum	Idealnya 100%
		2	Persentase jalan poros desa dalam kondisi baik	Panjang jalan poros desa dalam kondisi baik Panjang seluruh jalan poros desa	Dinas Pekerjaan Umum/ Sekretariat Daerah	Idealnya 100%
		3	Panjang drainase di perkotaan dalam kondisi baik	Panjang drainase di perkotaan dalam kondisi baik Panjang drainase di perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum	Idealnya 100%
		4	Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik Panjang seluruh jaringan irigasi kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum	Idealnya 100%
		5	Rasio kapasitas waduk terhadap kebutuhan air untuk lahan pertanian	Kapasitas waduk Jumlah kebutuhan air untuk lahan pertanian	Dinas Pekerjaan Umum	Idealnya 100%
		6	Persentase bangunan yang berIMB	Jumlah bangunan yang berIMB Jumlah bangunan	Dinas Pekerjaan Umum/ Badan Penanaman Modal dan Perizinan	Idealnya 100%
		E	Pentaan Ruang	1	Tersedianya RTRW	Ada/tidak
2	Tersedianya RDTRK Kecamatan			Ada/tidak	Dinas Pekerjaan Umum/ Bappeda	Merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penggunaan lahan
3	Tersedianya RUTK			Ada/tidak	Dinas Pekerjaan Umum/ Bappeda	Merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penggunaan lahan
		4	Tersedianya Tata ruang Kawasan	Ada/tidak	Dinas Pekerjaan Umum/ Bappeda	Merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penggunaan lahan
		5	Persentase kepatuhan penggunaan lahan terhadap RTRW	Luas lahan yang sesuai RTRW Luas wilayah seluruhnya	Dinas Pekerjaan Umum/ Bappeda	Idealnya 100%
F	Perencanaan Pembangunan	1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD	Ada/tidak	Bappeda	Merupakan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah
		2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD	Ada/tidak	Bappeda	Merupakan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah
		3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD	Ada/tidak	Bappeda	Merupakan pedoman dalam perencanaan pembangunan

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN	
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKP	Jumlah program RKP tahun berkenaan	Bappeda	Idealnya 100%
			Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan			
		5	Tersedianya Renstra SKPD	SKPD yang menyusun Renstra	Bappeda	Idealnya 100%
				Jumlah seluruh SKPD		
		6	Tersedianya Renja SKPD	SKPD yang menyusun Renja	Bappeda	Idealnya 100%
				Jumlah seluruh SKPD		
G	Perumahan	1	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	Dinas PU	Idealnya 100%
			Jumlah seluruh rumah tangga			
		2	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan kumuh yang ditangani	Dinas Pekerjaan Umum	Idealnya 100%
				Luas wilayah kawasan kumuh		
		3	Persentase rumah tangga ber sanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi	Dinas Pekerjaan Umum	Idealnya 100%
				Jumlah total rumah tangga		
		4	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	Luas Kawasan Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum	Idealnya 100%
				Luas Wilayah		
H	Kepemudaan dan Olahraga	1	Rasio Gelanggang / balai remaja terhadap jumlah remaja/pemuda	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah
			Jumlah penduduk usia remaja/pemuda			
		2	Rasio lapangan olahraga terhadap jumlah penduduk	Jumlah lapangan olahraga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah
				Jumlah penduduk		
		3	Persentase prestasi olahraga terhadap atlit yang dikirim	Jumlah prestasi olah raga yang diperoleh	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah
				Jumlah atlit yang dikirim mengikuti pertandingan		
		4	Persentase cabang olahraga yang aktif	Jumlah cabang olahraga yang aktif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Semakin tinggi persentase menunjukkan kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah daerah semakin baik
				Jumlah seluruh cabang olah raga		
		5	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Semakin tinggi persentase menunjukkan kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah daerah semakin baik
				Jumlah seluruh organisasi kepemudaan		
I	Penanaman Modal	1	Kenaikan Surat Persetujuan Investasi PMDN dan PMA	Jumlah Surat Persetujuan Insvestasi PMDN dan PMA	Badan Penanaman Modal dan Perizinan	Semakin tinggi kenaikan menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik
				Jumlah Surat Persetujuan Insvestasi PMDN dan PMA tahun sebelumnya		
		2	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN dan PMA	Nilai realisasi PMDN dan PMA	Badan Penanaman Modal dan Perizinan	Semakin tinggi kenaikan menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik
				Nilai realisasi PMDN dan PMA tahun sebelumnya		

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3 Tersedianya regulasi/perizinan PM	Jumlah perizinan PM yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah	Badan Penanaman Modal dan Perizinan	Sebagai pedoman dalam investasi
J	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Persentase Koperasi aktif	Jumlah Koperasi/koperasi yang melaksanakan RAT secara rutin Jumlah seluruh koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Idealnya 100%
		2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang sehat	Jumlah usaha mikro dan kecil yang sehat Jumlah seluruh usaha mikro dan kecil	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Idealnya 100%
		3 Peningkatan modal koperasi	Jumlah modal koperasi tahun berjalan Jumlah modal koperasi tahun sebelumnya	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Semakin tinggi kenaikan menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik
K	Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Persentase penduduk yang memiliki KTP	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial	Idealnya 100%
		2 Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran Jumlah penduduk	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial	Idealnya 100%
		3 Angka pertumbuhan penduduk	Jumlah kelahiran Jumlah penduduk	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial	Semakin rendah angka pertumbuhan penduduk menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah
		4 Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk Luas wilayah	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial	Semakin rendah angka kepadatan penduduk menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah
L	Ketenagakerjaan	1 Angka pengangguran	Jumlah penduduk usia kerja tidak bekerja Jumlah penduduk usia kerja	Dinas Tenaga Kerja	Semakin rendah angka pengangguran menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah daerah
		2 Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Dinas Tenaga Kerja	Idealnya 100%
		3 Penyelesaian perselisihan hubungan kerja	jumlah perselisihan hubungan kerja yang diselesaikan Jumlah perselisihan hubungan kerja yang terjadi	Dinas Tenaga Kerja	Idealnya 100%
		4 Rasio UMK terhadap kebutuhan minimum	Nilai UMK yang ditetapkan pemerintah Jumlah biaya untuk kebutuhan hidup minimum	Dinas Tenaga Kerja	Idealnya 100%

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN
		5	Pengawasan Tenaga Kerja Asing	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja asing yang berizin}}{\text{Jumlah tenaga kerja asing}}$	Dinas Tenaga Kerja	Idealnya 100%
M	Ketahanan Pangan	1	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak kebijakan tentang ketahanan pangan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati, dsb.	Kantor Ketahanan Pangan	Sebagai pedoman dalam penanganan masalah ketahanan pangan
		2	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan penduduk}}$	Kantor Ketahanan Pangan	Ketersedian bahan pangan dalam jumlah yang cukup menunjukkan kinerja pemerintah daerah baik
				$\frac{\text{Jumlah Konsumsi bahan pangan utama}}{\text{Jumlah penduduk}}$		
N	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}}$	Kantor KB dan PP	Semakin tinggi partisipasi menunjukkan semakin berperannya perempuan
				$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf}}{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun}}$		
		3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah pekerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}}$	Kantor KB dan PP	Semakin tinggi partisipasi menunjukkan semakin berperannya perempuan
				4		
O	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1	Prevalensi peserta Keluarga Berencana aktif		$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}}$	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
				2	Persentase penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	
P	Perhubungan	1	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas			$\frac{\text{Jumlah rambu-rambu lalu lintas}}{\text{Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dibutuhkan}}$

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN	
		2	Ketersediaan angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan	Jumlah angkutan umum dalam kondisi layak jalan	Dinas Perhubungan	Idealnya 100%
				Jumlah angkutan umum		
		3	Ketersediaan angkutan laut	Jumlah daya tampung kapal Jumlah penumpang	Dinas Perhubungan	Idealnya 100%
Q	Komunikasi dan Informatika	1	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak	Sekretariat Daerah	Menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi dan promosi
		2	Persentase SKPD yang terkoneksi	Jumlah SKPD yang terkoneksi jaringan Jumlah SKPD	Sekretariat Daerah	Idealnya 100%
		3	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat	Sekretariat Daerah	Menunjukkan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik
R	Pertanahan	1	Persentase penyelesaian ijin lokasi	Jumlah ijin lokasi yang diterbitkan Jumlah permohonan ijin lokasi	Badan Penanaman Modal dan Perizinan	Idealnya 100%
		2	Pesentase penyelesaian kasus tanah negara	Jumlah kasus/sengketa tanah negara yang diselesaikan Jumlah kasus/sengketa tanah negara yang terdaftar/terjadi	Sekretariat Daerah	Idealnya 100%
S	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1	Ketersediaan anggota linmas yang terampil	Jumlah anggota linmas yang telah mengikuti suskalak Jumlah anggota linmas seluruhnya	Kantor Kesbangpolinmas	Semakin tinggi menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah
		2	Forum komunikasi umat beragama	aktif/tidak aktif	Kantor Kesbangpolinmas	Menunjukkan kinerja pemerintah dalam peningkatan kesatuan bangsa
T	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian	1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Sekretariat Daerah	Menunjukan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik
		2	Persentase pejabatan sturktural yang memenuhi persyaratan pendidikan penjenjangan	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan yang dipersyaratkan Jumlah pejabat struktural	Badan Kepegawaian Daerah	Idealnya 100%
		3	Kesesuaian jumlah SKPD dengan pedoman	Jumlah SKPD Batasan maksimal jumlah SKPD	Sekretariat Daerah	Idealnya 100%
		4	Persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat	Jumlah bidang tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat Jumlah bidang tanah aset pemerintah daerah	Sekretariat Daerah	Idealnya 100%
		5	Kontirbusi PAD terhadap APBD	Jumlah PAD Jumlah APBD	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	Semakin tinggi menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN	
U	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	PKK aktif	Jumlah PKK aktif	Kantor Pemberdayaan	Idealnya 100%
				Jumlah PKK		
		2	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan	Idealnya 100%
				Total Posyandu		
		3	Prestasi Lomba Desa/Kelurahan	Mendapatkan Juara	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Semakin tinggi tingkatan prestasi menunjukkan kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah daerah yang baik
		4	Alokasi anggaran untuk ADD	Jumlah alokasi anggaran ADD	Bappeda	Minimal sesuai dengan ketentuan pemerintah
				Jumlah APBD		
5	Kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah	Jumlah kontribusi dana swasta dan dana swadaya masyarakat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat/ BAPPEDA	Semakin tinggi menunjukkan kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah daerah yang baik		
		Jumlah anggaran pembangunan				
V	Sosial	1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial	Semakin banyak menunjukkan kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah yang baik
		2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yg tertangani	Dinas Kependudukan,	Idealnya 100%
				Jumlah PMKS yg ada		
		3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan	Idealnya 100%
				Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan		
		4	Keluarga miskin yang memperoleh bantuan Raskin	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan Raskin	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan	Idealnya 100%
				Jumlah keluarga miskin		
		5	Warga meninggal yang memperoleh santunan kematian	Jumlah warga meninggal yang memperoleh santunan kematian	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan	Idealnya 100%
				Jumlah warga yang meninggal		
		6	korban bencana memperoleh bantuan sosial	Jumlah korban bencana yang memperoleh bantuan	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial/ Sekretariat Daerah/ Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan	Idealnya 100%
				Jumlah korban bencana		
W	Kebudayaan	1	Penyelenggaraan pertunjukan/festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan pertunjukan festival seni dan budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Semakin banyak menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah daerah

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Sebakin banyak menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah daerah
		3 Peningkatan jumlah pengunjung musium daerah	Jumlah pengunjung musium daerah Jumlah pengunjung musium daerah tahun sebelumnya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Sebakin banyak menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah daerah
		4 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Idealnya 100%
X	Statistik	1 Buku "kabupaten dalam angka"	Ada atau tidak	BAPPEDA	Merupakan bahan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah
		2 Buku "PDRB kabupaten"	Ada atau tidak	BAPPEDA	Merupakan bahan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah
		3 Buku Gresik Dalam Angka	Ada atau tidak	BAPPEDA	Merupakan bahan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah
		4 Buku Indek Pembangunan Manusia	Ada atau tidak	BAPPEDA	Merupakan bahan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah
Y	Kearsipan	1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku Jumlah SKPD	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Idealnya 100%
		2 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Semakin banyak menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah
Z	Perpustakaan	1 Rasio jumlah anggota perpustakaan terhadap jumlah penduduk	Jumlah anggota perpustakaan Jumlah penduduk	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Semakin tinggi menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah
		2 Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun Jumlah kunjungan ke perpustakaan tahun sebelumnya	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Semakin tinggi peningkatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah
		3 Jumlah koleksi buku perpustakaan	Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Semakin banyak menunjukkan semakin tinggi baik kinerja pemerintah daerah

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN	
		4	Persentase taman bacaan di setiap kecamatan	Jumlah kecamatan yang menyediakan taman bacaan Jumlah kecamatan	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Idealnya 100%
AA	Kelautan dan Perikanan	1	Persentase peningkatan produksi bidang perikanan	Jumlah produksi bidang perikanan (Ton)	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan	Semakin tinggi persentase peningkatan produksi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan petani/nelayan dan kinerja pemerintah daerah
				Jumlah produksi bidang perikanan tahun sebelumnya (Ton)		
		2	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan pada PDRB	Jumlah kontribusi sektor kelautan dan perikanan pada PDRB	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan/BAPPEDA	Semakin tinggi persentase peningkatan produksi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan peternak dan kinerja pemerintah daerah
				Jumlah total PDRB		
		3	Persentase peningkatan produktivitas tambak	Jumlah produksi hasil budidaya tambak (Ton)	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan	Semakin tinggi persentase peningkatan produktivitas menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan peternak dan kinerja pemerintah daerah
				Jumlah luas areal tambak budidaya (Ha)		
		4	Persentase penyelesaian sengketa nelayan	Jumlah sengketa nelayanyang dapat diselesaikan	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan	Idealnya sengketa nelayan dapat terselesaikan 100%
				Jumlah sengketa nelayan		
BB	Pertanian	1	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan	Semakin tinggi persentase peningkatan luas areal budidaya menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan petani dan kinerja pemerintah daerah
				Jumlah produksi tanaman pangan tahun sebelumnya (ton)		
		2	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Semakin tinggi persentase peningkatan luas areal budidaya menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan petani dan kinerja pemerintah daerah
				Jumlah produksi tanaman perkebunan tahun sebelumnya (ton)		
		3	Persentase peningkatan produksi bidang peternakan	Jumlah produksi bidang peternakan (Ton)	Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan	Semakin tinggi persentase peningkatan produksi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan peternak dan kinerja pemerintah daerah
				Jumlah produksi bidang peternakan tahun sebelumnya (Ton)		
4	Persentase peningkatan populasi ternak	Jumlah populasi ternak (Ekor)	Dinas Perikanan, Kelautan dan	Semakin tinggi persentase peningkatan populasi		

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN	
			Jumlah populasi ternak tahun sebelumnya (Ekor)	Peternakan	menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan peternak dan kinerja pemerintah daerah	
		5	Persentase peningkatan produktivitas budidaya padi	Jumlah produksi padi (ton) Jumlah luas lahan budidaya padi /sawah (ha)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Semakin tinggi persentase peningkatan produktivitas menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan petani dan kinerja pemerintah daerah
		6	Persentase peningkatan produktivitas pertanian tanaman perkebunan	Jumlah produksi tanaman pangan (ton) Jumlah luas lahan budidaya tanaman pangan (ha)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Semakin tinggi persentase peningkatan produktivitas menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan petani dan kinerja pemerintah daerah
		7	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB	Jumlah kontribusi sektor kelautan dan perikanan pada PDRB Jumlah total PDRB	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan/ BAPPEDA	Semakin tinggi persentase peningkatan produktivitas menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan petani dan kinerja pemerintah daerah
CC	Kehutanan	1	Peningkatan kemitraan pengelolaan hutan budidaya	Luas hutan budidaya kemitraan Luas total hutan budidaya	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Semakin tinggi menunjukkan semakin baik tingkat kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah daerah
		2	Pelayanan Izin penebangan pohon	Jumlah izin yang disetujui Jumlah permohonan izin penebangan pohon	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Semakin tinggi menunjukkan semakin baik tingkat kesadaran masyarakat dan kinerja pemerintah daerah
		3	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Semakin kecil menunjukkan semakin baik tingkat kesadaran masyarakat dan kinerja
DD	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Penanganan pertambangan tanpa ijin	Luas Penambangan Liar yang ditertibkan luas area penambangan yang liar	Sekretariat Daerah	Idealnya 100%
		2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan Jumlah total PDRB	Sekretariat Daerah/ BAPPEDA	Semakin tinggi kontribusi menunjukkan peningkatan peran dalam perekonomian daerah
EE	Pariwisata	1	Persentase peningkatan kunjungan wisata	Jumlah wisatawan Jumlah wisatawan tahun sebelumnya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Semakin tinggi persentase peningkatan kunjungan wisata menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah daerah
		2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda	Semakin tinggi kontribusi menunjukkan peningkatan peran

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Jumlah total PDRB	dan Olahraga/ BAPPEDA	dalam perekonomian daerah
		3 Obyek wisata yang dikelola	jumlah potensi obyek/obyek yang dikelola	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Semakin banyak obyek yang dikelola menunjukkan semakin baik kinerja pemerintan daerah
FF	Industri	1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan/ BAPPEDA	Semakin tinggi kontribusi menunjukkan peningkatan peran dalam perekonomian daerah
			Jumlah total PDRB		
		2 Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri tahun berjalan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Semakin tinggi peningkatan menunjukkan peningkatan peran dalam perekonomian daerah
			Jumlah Industri tahun sebelumnya		
GG	Perdagangan	1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan/ BAPPEDA	Semakin tinggi kontribusi menunjukkan peningkatan peran dalam perekonomian daerah
			Jumlah total PDRB		
		2 Peningkatan ekspor	Jumlah ekspor tahun berjalan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Semakin tinggi peningkatan menunjukkan peningkatan peran dalam perekonomian daerah
			Jumlah ekspor tahun sebelumnya		

**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.**